

FAKTOR LITERASI RENDAH BERKORELASI DENGAN SUBURNYA PENYEBARAN *HOAX*

Endang Fatmawati

eenfat@yahoo.com

Prolog

Komunikasi virtual telah memasuki seluruh area yang tanpa batas sehingga dunia terasa ada dalam genggaman. Seiring berkembangnya teknologi informasi maka semakin besar pula peluang tersebarnya *hoax* (baca: hoks). Apalagi dengan media sosial membuat setiap orang semakin mudah dalam memberikan informasi. Munculnya media baru seperti WA membuat informasi cepat sekali disebarkan, baik dengan japri maupun antargrup. Contoh nyata yang menurut saya aneh, ada grup WA dengan nama "panitia seminar" yang desain awal dibuat untuk memudahkan komunikasi dalam menyongsong *event* seminar. Namun seiring berjalannya waktu walaupun seminar belum berlangsung, isinya malah tausiah agama dan informasi lain, gambar, video yang terkadang tidak nyambung dengan kepanitiaan. Uniknya lagi pesan via WA tersebut selalu panjang-panjang sehingga membacanya butuh waktu yang agak lama. Semakin

diperparah lagi jika kondisi masyarakat literasinya rendah, sehingga tidak heran jika belakangan ini *hoax* semakin mengkhawatirkan peredarannya.

Sering juga saya mendapat email yang saya katakan nyasar, kadang masuk di *spam* tapi juga sering di *inbox*, misalnya mengatasnamakan orang dari luar negeri yang tiba-tiba minta sumbangan karena keluarganya sakit keras. Pesan melalui SMS juga sering masuk ke ponsel saya, misalnya pemberitahuan menang undian, minta pulsa, dapat kejutan hadiah, disuruh transfer ke nomer rekening tertentu, dan masih banyak yang lainnya. Awalnya sempat kaget juga sih, tapi lama-lama menjadi tenang dan dengan percaya diri langsung saya hapus. Kita sadar bahwa di awal tahun 2017, semua kalangan pasti dibuat tercengang, karena mendengar kabar *hoax* yang beraneka ragam menghiasi media cetak dan digital di negeri ini. *Hoax* menjadi isu hangat yang layak diperbincangkan pemecahannya. Sewaktu ada musibah misalnya, waktu itu pernah terjadi begitu diinformasikan kabar pesawat Sukhoi kecelakaan, pernah langsung menyebar gambar dan foto pesawat Sukhoi yang jatuh beserta kondisi korbannya, alhasil begitu orang mendapat gambar itu langsung *share* ke jejaring yang lain, padahal itu *hoax*. Nah inilah poin pentingnya yaitu mencari akar permasalahannya,

mengapa hal itu bisa terjadi, kira-kira penyebabnya apa, dan seterusnya.

Pustakawan sebagai warga yang hidup di tengah masyarakat, harus terpenggil untuk turut serta berperan dalam menekan penyebaran *hoax* tersebut. Di samping secara lebih luas juga menjaga dari bahaya teroris, jaringan narkoba, pornoaksi maupun pornografi yang melibatkan jaringan internet. Pustakawan harusnya prihatin dan menggalang pemikiran untuk memunculkan tindakan solutif, karena saat ini berita *hoax* semakin merajalela, beredar luas dan menjadi konsumsi berbagai elemen masyarakat.

Definisi

Menurut *Cambridge Dictionary* kata *hoax* artinya "*a plan to deceive someone*". Dalam kamus *Cambridge* tersebut dicontohkan ada trik penipuan yaitu orang yang mengatakan kepada polisi bahwa ada bom di suatu tempat, dan ancaman bom tersebut ternyata hanya tipuan walaupun sebelumnya orang tersebut telah membuat panggilan tipuan dengan trik yang mengaku sebagai presiden.

Jadi *hoax* bisa dikatakan sebagai berita palsu, tipuan atau lelucon, kegiatan menipu, trik penipuan, atau rencana penipuan. Sepertinya *hoax* sengaja diproduksi dan didistribusikan secara masif tanpa

batas. Fenomena ini merangsang pustakawan untuk berpikir kreatif dan kritis agar menghasilkan konsep mujarab untuk menghadapi informasi *hoax*. Paling tidak minimal mengetahui informasinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak maupun ada rekayasa tertentu atau tidak.

Pustakawan harus menyadari bahwa kabar bohong mulai marak semenjak masyarakat akrab dengan yang namanya media sosial. *Hoax* saat ini tumbuh tak terkendali di media sosial, baik itu melalui halaman situs, pesan berantai, gambar yang digunakan sebagai basis data, dan lain sebagainya. Jadi *hoax* bisa menyangkut berbagai bidang, dari isu pendidikan, politik, ekonomi, keuangan, kesehatan, dan merambah di bidang lainnya. Bahkan jika dibiarkan, *hoax* akan berpotensi memicu keributan dalam skala nasional. Apalagi menjelang pesta politik pilkada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu, kita saksikan bersama adanya suhu politik yang dipicu juga oleh beragam berita yang menghiasi berbagai media. Lawan politik saling mencari kelemahan dan menjatuhkan kompetitor dengan menciptakan berita bombastis yang cenderung bermuatan politis.

Kita digelisahkan oleh dominasi *hoax*, kekhawatiran gelombang kebohongan akan mendera tanpa kendali, merangsang emosi negatif, menimbulkan kekacauan dan kegelisahan,

menciptakan atmosfir kebohongan lahir dan batin, dan dampak negatif lainnya. Budaya ikut-ikutan, baik *mem-posting*, *men-tweet*, *men-share*, *memberi comment*, *me-like*, akan menjadi kebiasaan semesta yang keaslian motif individunya perlu dipertanyakan. Jadi hal ini akan memunculkan “budaya jangan-jangan (bohong, tidak benar, palsu, dan lain sebagainya)”.

Adanya kompetensi literasi informasi yang dimiliki masyarakat, keberadaan pustakawan dan perpustakaan, mestinya penyebaran *hoax* itu bisa diminimalisir. Ibarat seperti pedang bermata dua, di balik berkah kemajuan teknologi informasi, musibah juga mengintai di sekeliling kita. Sejak bangun tidur kita cenderung mencari informasi di media berbasis internet daripada harus membuka media cetak konvensional semacam surat kabar. Apabila dengan *iPad*, *iPhone*, dan *smartphone* yang berbasis android kini semakin mudah dioperasikan oleh siapapun.

Hadirkan Akurasi

Pasti ada motivasi yang melatarbelakangi seseorang yang sengaja menyebarkan *hoax*. Ada nilai dari informasi yang disebarkan dan berhubungan dengan kepentingan di balik itu tentunya, entah itu kepentingan ekonomi, politik, dan yang lainnya. Ada sisi keuntungan bagi penyebar, tetapi kerugian bagi yang mengkonsumsinya. Konon manakala berita baik

baru menyebar dalam lingkup kecil, namun berita negatif sudah demikian besar melebar ke mana-mana.

Berita palsu mudah menyebar dan naifnya berita itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Masifnya peredaran *hoax* di tengah masyarakat membuat Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku tanggal 9 Februari 2017 yang lalu menyatakan bahwa hadirnya media sosial turut memusingkan, terutama karena *hoax* berseliweran. Menurut Presiden, lebih mudah mengendalikan media arus utama (*mainstream*) ketimbang media sosial. Penyebab utamanya karena setiap orang bisa memproduksi berita tanpa melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menangkal penyebaran *hoax* dengan cara memblokir situs-situs yang memuat konten yang menonjolkan hasutan dan mengarah pada sentimen tertentu. Begitu pula otoritas di Kementerian Komunikasi dan Informasi juga sudah mengambil langkah sebagai upaya melawan *hoax* tersebut. Bagaimana dengan pustakawan Indonesia?

Pustakawan wajib mengedepankan profesionalitas sebagai pengelola informasi. Pada ranah ini, pustakawan harus menyadari bahwa yang dibutuhkan oleh pemustaka adalah informasi akurat yang sudah terverifikasi, bisa dipercaya, akuntabel,

dan memiliki unsur kebenaran. Inilah posisi penting perpustakaan sebagai gawang informasi yang sehat, yang menyediakan sumber ilmu pengetahuan bagi generasi cerdas. Generasi digital yang dekat dengan teknologi menjadi ciri masyarakat modern sekarang ini. Anak dan cucu kita lebih akrab dengan gawai daripada orang tuanya.

Tapscott (2009) mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah melahirkan "*media literate kids*" atau anak-anak yang melek media, yang pada dasarnya mereka hidup dalam dunia digital. Jika Ibrahim (2007) menyebutnya bahwa dunia bagi kawula muda yang larut dalam fantasi-fantasi dunia digital, pop, dan paham *e-commerce*. Generasi anak-anak muda yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan budaya baru media digital yang interaktif, yang berwatak menyendiri, berkomunikasi lebih utama dengan email, melek komputer dan internet, dibesarkan dengan *video games*, lebih menggunakan waktu luang untuk mendengarkan radio dan menonton televisi.

Tindakan Pemerintah

Maraknya informasi *hoax* yang beredar luas menjadi persoalan serius. Tidak tanggung-tanggung sampai pemerintah Indonesia bertindak represif dengan melakukan pemblokiran situs penyebar kabar

hoax dan menerapkan proses hukum terhadap orang yang membuat kabar *hoax*. MUI turun tangan meminta agar masyarakat lebih cerdas dalam menyaring kabar yang beredar di media sosial. Artinya setiap informasi yang diterima hendaknya dicari sumbernya dan perlu diklarifikasi apakah akurat atau tidak. Pustakawan harus mampu berperan dalam mengedukasi pemustaka dalam hal literasi informasi. Misalnya untuk melakukan konfirmasi (*tabayyun*) terlebih dahulu terhadap data informasi yang diterima dan jika sudah benar maka baru disebar.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pernah menyebut bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kejahatan berbasis internet yang cukup tinggi. Hal ini karena *cyber* merupakan salah satu target dunia maya yang target kriminalnya paling banyak, dan salah satu negara yang paling banyak terkena dampak kasis *cyber crime* itu adalah Indonesia.

Pada jejaring sosial FB, ada gerakan pemberantasan berita palsu di *fanpage Indonesian Hoaxes Community* (IHC). Hal ini menunjukkan bahwa di tengah masifnya berita *hoax* yang semakin pesat penyebarannya, telah memunculkan pusat-pusat informasi *hoax* di Indonesia, sehingga ibarat sebuah

oase bagi masyarakat untuk memilih berita atau informasi di internet yang terpercaya.

Seperti dua sisi mata uang, pesatnya perkembangan teknologi internet juga diiringi dengan munculnya kejahatan di dunia maya. Semakin hari penyebaran berita bohong dan fitnah di media sosial semakin memprihatinkan. Kita semua juga tahu bahwa pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian sudah ekstra kerja keras melakukan *tracing* terhadap *hoax*, namun oknum pelaku justru semakin canggih menggunakan mesin, robot, tenaga jasa profesional, konsultan yang bisa dibayar kontennya, bahkan justru diviralkan.

Muncul elemen yang menentang *hoax*, melawan ketidakadilan dan ketidakjujuran di media sosial. Suatu contoh yaitu terbentuknya Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) yang berhasil membangun aplikasi *Turn Back Hoax*, yang dapat dilihat secara *online* dalam model dekstop. Ada juga grup diskusi di FB yang dibentuk oleh para aktivis media sosial dari berbagai unsur misalnya bernama: Forum Anti Fitnah Hasut dan *Hoax* (FAFHH), Forum Anti Fitnah dan *Hoax* Indonesia (FAFHI). Kampanye dengan menamakan Deklarasi Masyarakat Anti-*Hoax* untuk mengajak masyarakat agar memakai media sosial secara positif dan tidak menyebarkan berita palsu juga gencar dilakukan di sejumlah daerah di

Indonesia. Selain kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya, baru-baru ini di tiga kota di Provinsi Jawa Tengah (Semarang, Solo, Wonosobo) juga mendeklarasikan antiberita *hoax*.

Ciri Hoax

Pustakawan harus memiliki kompetensi literasi informasi sehingga bisa mengenali suatu informasi yang layak dikonsumsi dan di-*share* kepada pemustakanya. Pendidikan pemustaka terkait literasi informasi ini harus digalakkan di berbagai tingkatan. Untuk mengetahui apakah informasi berupa *hoax*, cirinya bisa saya sebutkan antara lain:

- a. Pesan disertai nada perintah untuk menyebarkan dengan ancaman tertentu;
- b. Biasanya judulnya sensasional dan bersifat provokatif;
- c. Tidak ada tanggal kapan informasi itu di-*posting*;
- d. Tidak jelas pengirimnya, baik nama maupun identitasnya;
- e. Menyisipkan kata, angka, huruf, untuk mengelabui pembaca (misalnya ayatnya dibelokkan);
- f. Informasi yang belum waktunya tapi disebar (misalnya: anjuran puasa sunah pada tanggal-tanggal tertentu);

- g. Website atau *link* dengan alamat URL yang meragukan;
- h. Foto yang disertakan kelihatan tidak asli;
- i. Tidak ada organisasi resmi yang dikutip sebagai sumber informasi;
- j. Informasi mendadak terkait pelayanan publik yang biasanya disertai perintah untuk melakukan 'sesuatu' (misalnya pemadaman lampu);
- k. Biasanya mencatut nama pejabat, perusahaan, maupun tipuan lainnya.

Nah setelah mengetahui ciri-cirinya, maka pustakawan bisa bersikap lebih hati-hati. Caranya adalah dengan mengendapkan dulu, berpikir menggunakan logika, memastikan kebenaran, dan jika bimbang atau ragu bisa menanyakan kepada pihak yang lebih tahu, jika diri kita kebetulan mengetahui kalau *hoax*, maka upayakan untuk segera memberi tahu yang mengirim informasi tersebut melalui jaringan pribadinya. Melalui japri karena untuk menghargai yang bersangkutan agar tidak merasa dipermalukan.

Selanjutnya Mafindo menjabarkan 5 (lima) langkah untuk mengetahui sebuah informasi layak dikonsumsi atau tidak, yaitu:

1. **Memeriksa ulang judul berita provokatif.** Judul berita kerap dipakai sebagai jendela untuk mengintip keseluruhan tulisan. Namun tak jarang hal itu dimanfaatkan para penyebar berita palsu dengan mendistorsi judul yang provokatif meski sama sekali tak relevan dengan isi berita. Mafindo menyarankan pembaca untuk mengecek sumber berita lain agar informasi yang diterima bukan hasil rekayasa.
2. **Meneliti alamat situs web.** Dewan Pers memiliki data lengkap semua institusi pers resmi di Indonesia. Data yang terhimpun itu bisa digunakan oleh pembaca sebagai referensi apakah sumber berita yang dibaca telah memenuhi kaidah jurnalistik sesuai aturan Dewan Pers. Cukup mengetik nama situs berita di kolom data pers, pembaca dapat mengetahui status media yang mereka konsumsi berdasarkan standar Dewan Pers.
3. **Membedakan fakta dengan opini.** Mafindo menganjurkan pembaca tidak menelan mentah-mentah ucapan seorang narasumber yang dikutip oleh situs berita. Sering kali hal itu luput dari pembaca karena pembaca terlalu cepat mengambil kesimpulan. Semakin banyak fakta yang termuat di sebuah berita, makin banyak kredibel berita itu.

4. **Cermat membaca korelasi foto dan *caption* yang provokatif.** Persebaran foto provokatif dengan imbuhan tulisan yang telah disunting. Cara termudah menguji keabsahan informasi dari foto yang diterima, pembaca bisa membuka *Google Images* di aplikasi penjelajah lalu menyeret foto yang dimaksud ke kolom pencarian.
5. **Ikut serta dalam komunitas daring.** Menurut Mafindo, setidaknya ada empat komunitas yang getol memerangi berita palsu di Indonesia. Keempatnya itulah yang menjelma menjadi Mafindo. Dengan model *crowdsourcing*, komunitas itu berusaha menyaring dan mengklarifikasi informasi yang meragukan kebenarannya.

Tidak Asal *Share*

Media sosial (seperti FB dan Line) dapat menghubungkan orang dari berbagai penjuru dunia dengan menggunakan jaringan TIK. Melalui akun pada aplikasi tersebut, dapat menelusuri dan menghubungkan penggunaanya dengan teman-teman masa lalu dari berbagai belahan dunia. Tapi sisi negatifnya jika menggunakan *smartphone* untuk bergosip hal yang tidak perlu, curhat yang berlebihan, bahkan lebih parah media untuk menjalin perselingkuhan. *Na'udzu billahi mindzalik.*

Perdebatan yang mengemukan akibat *hoax* dari hari ke hari semakin meresahkan. Beberapa kali *hoax* yang pernah viral di media sosial juga pernah berdampak negatif karena akhirnya justru memicu keributan. Bahkan lebih parah lagi merembet menjadi kekerasan fisik. Jadi perlu diingat agar tidak asal *share* jika memperoleh informasi. Pahami dan periksa dahulu sebelum dikirim, kemudian bijaklah dalam membagikan informasi dan berkomunikasi di media sosial.

Website/situs menjadi satu jenis media *online* berupa halaman yang berisi beragam informasi dengan satu *domain web*, misalnya *Google, Facebook, Detik.com, Yahoo*, dan lain sebagainya. Jika kita menerima informasi kemudian kita yakin bisa memastikan kalau memang *hoax*, maka kita bisa melapor. Terkait laporan ini misalnya jika FB (*fitur report status*), Google (*fitur feedback*), Twitter (*fitur report tweet*), maupun mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Kemkominfo sudah berulang kali bertindak tegas dengan memblokir situs web yang menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), beraroma provokatif, mengandung konten negatif, maupun yang telah menyebarkan konten ilegal menurut UU ITE, baik itu situs konten media Islam

maupun situs lainnya. Situs web yang kontennya bertentangan dengan regulasi, undang-undang, *hatespeech*, pornografi, *child abuse*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tak heran jika saat ini muncul juga fenomena "masyarakat *anti-hoax*". Selanjutnya untuk Masyarakat Indonesia Anti Hoax sendiri juga menyediakan *link* halaman untuk menampung aduan *hoax* dari para *netizen* yaitu di data.turnbackhoax.id.

Sangat memprihatinkan, jika kita mengetahui kasus, sudah beritanya *hoax* lalu di-*share* pula. Pustakawan yang merangkap sebagai *netizen* dan orang yang beradab, hendaknya bisa melakukan kontrol diri dan mampu menularkan kebiasaan untuk menahan diri agar tidak asal klik dan *share* sembarangan. Menjaga omongan dalam bermedia sosial sangat penting dan menjadi renungan.

Pustakawan dapat aktif join di grup diskusi *anti-hoax* yang saat ini banyak bermunculan. Janganlah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, sumir, bohong, hasutan/provokasi, cenderung fitnah, ujaran kebencian, adu domba, fabrikasi cerita, serta permusuhan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "*Cukuplah seseorang dicap sebagai pendusta apabila ia mengatakan semua yang didengar (HR. Muslim)*". Budayakan dan kembangkan masyarakat yang santun dan beretika, sehingga jika memberikan

kritikan hendaknya yang membangun dan bertanggung jawab. Bijaklah dalam men-*share* sesuatu di media sosial.

Peran Pustakawan

Ada berita *hoax*, salahkah pustakawan? Peran pustakawan dalam mengatasi penyebaran *hoax* menarik untuk dibahas. Seharusnya portal-portal yang bergerak seperti media profesional, dengan nama akun dan mengunggah *hoax* yang mestinya bertanggung jawab terhadap isi berita yang diunggahnya. Namun saya rasa bukan salah dan benar yang perlu dibahas, namun harus dipahami bahwa perpustakaan adalah disebut juga sebagai media. Dengan demikian mengikat terhadap fungsinya sebagai sumber informasi sehat bagi masyarakat. Dari gelombang kegalauan berkelindannya berita *hoax*, langkah seperti apa yang bisa dilakukan pustakawan? Perlu dipikirkan juga, langkah apa yang harus dilakukan oleh pustakawan untuk menghadapi fenomena *hoax* seperti sekarang?

Pada situasi berita *hoax* yang terus berkelindan, maka pustakawan perlu membekali diri dengan kemampuan mengenali emosi di dalam diri (kesadaran diri dan manajemen diri) maupun kemampuan mengenal dan mengelola emosi orang lain (kesadaran sosial dan manajemen sosial). Sebab

jika tidak maka bisa jadi tersulut emosi dengan hadirnya berita bohong yang rawan konflik. Begitu pula kepercayaan diri (efikasi diri) bagi seorang pustakawan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika muncul keributan terkait berita bohong tersebut. Kuncinya adalah meningkatkan berbagai kompetensi literasi bagi dirinya.

Banyak reaksi dan respon yang muncul di kalangan pustakawan Indonesia. Pustakawan ada yang malah tertawa adanya berita *hoax*, ada yang merapat duduk bersama lalu berdiskusi, ada yang menyimak saja tanpa kepedulian, ada yang menggelar temu ilmiah dengan topik pustakawan dan *hoax*, ada yang bersikap skeptik karena paham, kemudian ada yang melawan melalui peneguhan barisan anti-*hoax*. Ketua PWI Provinsi Jateng "Amir Machmud NS" baru-baru ini menyampaikan dalam opininya bahwa "media sosial tidak bisa dimasukkan dalam kelompok media yang punya tanggung jawab institusional ketika dari entitas ini muncul unggahan-unggahan sembarangan".

Saya berpendapat bahwa di tengah maraknya *hoax*, pesatnya media teknologi, dan isu terkait peran pustakawan, maka pustakawan harus berjiwa kuat terutama terkait unsur kompetensi, orang, layanan, dan capaian hasilnya. *Great multiple competence* berhubungan dengan beragam kompetensi yang

dimiliki khususnya terkait dengan mengatasi penyebaran informasi *hoax*, seperti literasi informasi, literasi visual, dan literasi media. *Great people* dengan membangun pribadi dan sikap positif dalam pelayanan perpustakaan termasuk menyaring informasi dan mengkritisi informasi yang beredar. *Great service*, maksudnya pentingnya pustakawan melayani pemustaka dengan pelayanan prima. Sementara *great results*, yaitu mampu memahami teknik melayani pemustaka, baik secara langsung maupun melalui telepon, berkomunikasi secara asertif, dan mampu mengelola keluhan pemustaka.

Ayo pustakawan jangan banyak mengeluh dengan fakta merebaknya *hoax*. Marilah bersikap optimis menangkal sebaran *hoax* yang beredar. Mari kita bersama-sama merapat menghadapinya dengan sikap bijaksana. Khususnya saat ini, mencari solusi terbaik dalam mengatasi fenomena *hoax* adalah menjadi prioritas utama. Pustakawan hendaknya memulai memberikan contoh dari diri sendiri, mulai membangun sebuah budaya baru, membangun nilai-nilai kesopanan, kesantunan dalam berucap, dalam menyampaikan ujaran-ujaran di media sosial. Mohon jangan menghasut, jangan memfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian melalui media.

Kita semua mungkin masih teringat dengan keluh kesah SBY di akun *twitter* tanggal 20 Januari 2017 yang lalu, yang cuitannya "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar 'hoax' berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*." Tak pelak kicauan tersebut ternyata menjadi viral di media sosial, banyak yang suka, banyak yang mengecam, banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju, dan respons yang lainnya. Jika dianalisis sebenarnya tulisan di *twitter* pada akun seseorang itu kan pendapat pribadi, sah-sah saja ditulis, cuma permasalahannya perlu menimbang siapa yang menulis, pada situasi dan kondisi seperti apa, melanggar undang-undang atau tidak, isinya kira-kira menimbulkan masalah atau tidak, dan pertimbangan lainnya.

Pustakawan ada baiknya menerapkan kiasan ibarat memiliki "mata burung" dan berpikir *out of the box*. Artinya pustakawan tersebut di samping memiliki banyak pengetahuan, namun juga mampu melihat permasalahan *hoax* dari berbagai sudut, dan mampu menganalisis masalah serta menyelesaikannya dengan perspektif yang berbeda. Kejelian mengevaluasi informasi dan kemampuan menyikapi peredarannya adalah suatu keharusan bagi pustakawan. Pustakawan seharusnya miris jika melihat anak-anak belajarnya tidak bersama guru

ataupun orang tuanya tetapi pada *Google*, begitu pula belajar agama tidak dengan para alim ulama tapi pada *Google*, sehingga dikhawatirkan tidak memahami ajaran agama secara benar.

Bukan berarti mencari lewat *Google* itu salah, namun informasi yang diperoleh harusnya tetap diseleksi, seperti mengecek sumber aslinya dari mana dan mengetahui siapa yang menulisnya. Untuk memudahkan pencarian jurnal dan buku ilmiah bisa menggunakan *Google Scholar* dan *Google Books*. Intinya tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan *Google*. Rekam jejak yang menulis harus jelas, perlu ditelusur dari mana asalnya, kapasitas, kepakarannya, serta kebenarannya. Tausiah dari kiai justru tidak disebar, namun informasi yang belum jelas yang didapat dari media sosial justru malah ramai-ramai disebar. *Wallahu a'lam bishshawab*.

Saat ini *hoax* yang beredar sulit dikendalikan karena media sosial tidak mungkin bisa dihindari. Saya rasa pustakawan bisa ikut serta gabung di grup diskusi *anti-hoax* yang komunitasnya banyak bermunculan, di samping dalam lingkup sesama profesi pustakawan. Marilah belajar dengan memulainya dari diri sendiri, jangan sekali-kali menyebarkan berita ke lingkaran pertemanan maupun pemustaka secara luas sebelum jelas kebenaran informasinya. Dalam hal ini, mau dilihat

dari sudut pandang mana penyelesaiannya, yang mau saya sampaikan adalah pustakawan sangat berperan dalam memberikan pendidikan pemustaka terkait konsumsi informasi ini. Ibarat korelasi, maka literasi yang tinggi menjadi kunci untuk menekan penyebaran informasi *hoax*.

Epilog

Kebebasan berekspresi boleh-boleh saja, namun oleh karena kita hidup dalam era media sosial yang memungkinkan siapa pun menjadi produsen informasi, maka dibutuhkan kompetensi literasi bagi setiap orang. Tidaklah berlebihan jika diperlukan semacam *khittah* pustakawan yang bisa menjaga *marwah* perpustakaan. Saat ini memiliki kompetensi literasi informasi saja tidaklah cukup, sepertinya menjadi hal yang wajib pustakawan untuk memiliki kompetensi literasi media yang menyeluruh untuk memperkuat respons dan kekritisian dalam hal mengatasi penyebaran *hoax* maupun menyaring informasi sebelum disebarkan. Literasi yang tinggi akan menghalau menyebarnya informasi *hoax*, sehingga saya pikir kedua variabel tersebut akan saling berkorelasi satu sama lain.

Bacaan

Agung, B. (2017). *Lima Cara Antisipasi Berita Hoax di Media Sosial*. CNN Indonesia. Dalam <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161201200807-185-176705/lima-cara-antisipasi-berita-hoax-di-media-sosial/> [diakses 12 Februari 2017].

Ibrahim, I. S. (2007). *Budaya Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.

Machmud NS, A. (2017). Keadaban Informasi. *Suara Merdeka*, Jumat 20 Januari, hal. 4, kol. 3-6.

Meaning of "hoax" in the English Dictionary, available at <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations> [accessed 12 Februari 2017].

Tapscott, D. (2009). *Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation*. USA: McGraw Hill.